

PROSPEK *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)* DI SUMATERA UTARA DILIHAT DARI SISI LITERASI KEUANGAN, INKLUSI KEUANGAN DAN KEMISKINAN

PROSPECTS OF FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) IN NORTH SUMATRA VIEWED FROM THE SIDE OF FINANCIAL LITERACY, FINANCIAL INCLUSION AND POVERTY

¹Pipit Buana Sari, ²Handriyani Dwilita

^{1,2}*Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Pembangunan Pancabudi
Jalan Jend Gatot Subroto Km 4,5 Medan*

*email: ¹pipitbuana@dosen.pancabudi.ac.id,
²Handriyanidwilitia@dosen.pancabudi.ac.id*

Abstract. *The access to the formal financial system in Indonesia reaches only 52% of the total population. The National Strategy for Inclusive Finance (SNKI) as stipulated in Presidential Decree No. 82 of 2016 is targeting financial inclusion index by 75% in the year 2019. One way to rapidly expand financial inclusion is to utilize the technology. The access to financial services can help people to get out of poverty. The research method used is a descriptive Qualitative conducted through a collection of articles, journals and other information sources. This study is explorative and qualitative due to the limited of structured data. This study aims to view the potential of fintech in North Sumatra in terms of financial literacy, financial inclusion, and poverty. The research results that fintech can thrive in Sumatra Utara. Literacy and financial inclusion can be well developed. Electronification has run well which can be seen from the payment of salaries of civil servants (PNS) from cash into non-cash. The growth of Third Party Fund also increased but only in the cities of Medan and has not reached other cities yet. The population of poverty level also showed a decline.*

Keywords: Financial Literacy, Financial Inclusion, Fintech

Abstrak. *Akses ke sistem keuangan formal di Indonesia secara nasional hanya menjangkau sekitar 52% dari total jumlah penduduk. Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016 menargetkan pencapaian indeks inklusi keuangan sebesar 75% ditahun 2019. Salah satu cara untuk memperluas inklusi keuangan secara cepat adalah dengan memanfaatkan teknologi. Adanya akses terhadap layanan keuangan dapat membantu masyarakat untuk dapat keluar dari kemiskinan. Adapun Metode penelitian yang dilakukan merupakan studi komparasi melalui kumpulan artikel, jurnal serta sumber informasi lainnya. Kajian ini bersifat deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini sendiri melihat potensi fintech di Sumatera Utara dari sisi literasi keuangan, inklusi keuangan dan kemiskinan. Dari hasil penelitian dapat dilihat fintech dapat berkembang pesat di Sumatera Utara. Literasi dan inklusi keuangan berkembang baik. Elektronikasi dan pemanfaatan digital technologies sudah berjalan cukup baik, diantaranya dilihat dari pembayaran gaji pegawai negeri maupun swasta dari tunai menjadi non tunai, serta penggunaan kartu dan uang elektronik. Dari sisi perbankan, Pertumbuhan Dana Pihak*

Ketiga juga mengalami peningkatan tetapi hanya di kota Medan dan belum merata ke kota lainnya. Tingkat Jumlah penduduk miskin juga menunjukkan penurunan, khususnya di daerah pedesaan. Faktor-faktor tersebut mencerminkan potensi pengembangan penerapan fintech di Sumatera Utara sangat mendukung.

Kata Kunci: Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Fintech

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat penetrasi layanan perbankan yang rendah. Indonesia tergolong tertinggal dalam hal inklusi keuangan, dibandingkan negara berkembang lainnya. Indeks literasi keuangan pada tahun 2013 sebesar 21,8% mengalami peningkatan menjadi 29,7% pada tahun 2016. Hal yang sama juga ditunjukkan indeks inklusi keuangan tahun 2013 sebesar 59,7% menjadi 67,8 % di tahun 2016. Walaupun terjadi peningkatan baik indeks literasi keuangan maupun indeks inklusi keuangan namun Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan Negara-Negara di Asia dan Pasifik. Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016, ditargetkan pencapaian indeks inklusi keuangan sebesar 75% ditahun 2019. Literasi keuangan bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan, sehingga terjadi peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan demi terwujudnya kesejahteraan. Dan Inklusi Keuangan memberikan gambaran akses setiap personal ke lembaga, layanan dan produk keuangan. Inklusi keuangan menjadi perhatian pemerintah sebab peran inklusi keuangan Nasional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Nasional yang berkelanjutan, mengurangi kesenjangan (inequality), rigiditas low income trap, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga baik literasi keuangan maupun keuangan inklusi sangat penting bagi pencapaian tujuan jangka panjang SNKI. Salah satu gambaran pencapaian inklusi keuangan dapat dilihat dari jumlah akses keuangan perbankan. Hasil survey Bank Dunia (2014), hanya 36% populasi penduduk dewasa Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal. Sedangkan rata-rata negara Asia Timur dan Pasifik telah mencapai 69%. Penduduk Thailand jauh diatas Indonesia dimana 78% penduduknya memiliki rekening bank.

Salah satu cara untuk memperluas inklusi keuangan maupun meningkatkan literasi keuangan secara cepat adalah dengan memanfaatkan digitalisasi perbankan dan financial technology (Fintech). Penggunaan telepon selular atau smartphone sangat membantu terlaksananya digitalisasi perbankan dan Fintech. Penetrasi telepon selular memberikan hasil yang sangat timpang dibandingkan angka rekening bank. Survey we are social menyebutkan, 91% penduduk Indonesia memiliki ponsel. Sedangkan pemilik smartphone sebesar 47%. Pengguna kartu ponsel bahkan lebih besar dari populasi Indonesia, yaitu 371,4 juta atau 142% dari populasi. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2016, pengguna internet di Indonesia sebesar 132,7 juta jiwa dimana Sumatera mencapai sebesar 15,7%. Tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah pengguna internet sebesar 143,26 juta jiwa atau 54,68% dari total populasi Indonesia, dimana pengguna di wilayah Sumatera naik cukup tinggi sebesar 47,20%. Besarnya pengguna ponsel bisa dimanfaatkan untuk menjangkau sistem keuangan melalui layanan keuangan digital. Sehingga pengguna smartphone yang memiliki akses

internet, yang masih belum tersentuh sistem keuangan bisa dijangkau sistem keuangan melalui perangkat mobile.

Trend penggunaan transaksi digital juga terus meningkat seiring meningkatnya penetrasi internet. Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan pengguna e-banking melonjak 270 persen, dari 13,6 juta nasabah pada 2012 menjadi 50,4 juta nasabah tahun 2016. Frekuensi transaksi pengguna e-banking juga naik 169%, dari 150,8 juta transaksi pada tahun 2012 menjadi 406,6 juta transaksi pada 2016

Perusahaan teknologi keuangan (Fintech) mempunyai peluang berkembang di Indonesia hal ini dikarenakan era digital makin melekat di kehidupan masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Indonesia Fintech Report 2016 ternyata 18,86% masyarakat Indonesia sudah memanfaatkan jasa Fintech. Dari segi pembiayaan total kebutuhan pembiayaan nasional adalah Rp1.649 Triliun, sementara kapasitas perbankan hanya Rp 660 Triliun, selisih dari dana tersebut merupakan potensi yang bisa diisi oleh fintech (Kompas.com,22/03/2017).

Sumatera Utara dengan Medan sebagai ibukota Provinsi terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kotamadya. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan dimana jumlah penduduk Sumatera Utara pada 2015 sebanyak 13,9 juta jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebesar 6,95 juta jiwa (49,9%) dan perempuan sebesar 6,98 juta jiwa (50,1%). Pada tahun 2014 sebanyak 49,2% penduduk tinggal di perkotaan dan sisanya 50,8% tinggal di pedesaan. Medan adalah kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya dengan populasi di tahun 2015 mencapai 2.210.624 jiwa. Indeks literasi keuangan nasional tahun 2016 menurut survei OJK sebesar 29.66 % mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 sebesar 21.84 %. Secara sektoral perbankan yang tertinggi sebesar 28.94% dan terendah pasar modal sebesar 4.40%. Masyarakat Indonesia hanya 36.02% yang memiliki kemampuan menghitung bunga, angsuran, hasil investasi, biaya penggunaan produk, denda dan inflasi. Untuk Sumatera Utara sendiri Indeks Literasi Keuangan di tahun 2016 sebesar 32.36% lebih tinggi daripada nasional.

Survei OJK tahun 2016 menunjukkan Indeks Inklusi Keuangan sebesar 67.82% Indeks Inklusi Keuangan untuk provinsi Sumatera Utara sebesar 75.27% lebih tinggi daripada nasional.

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk melihat prospek pengembangan Fintech di Sumatera Utara dikaji dari variabel tingkat literasi keuangan, inklusi keuangan dan Kemiskinan. Variabel tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan dilihat melalui penerapan digitalisasi serta elektronikfikasi transaksi keuangan

Landasan Teori

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengartikan literasi keuangan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Inklusi Keuangan sendiri menurut OJK adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bila sektor swasta dan pemerintah melakukan transaksi

keuangan secara digital (bukan tunai), mereka dapat berperan penting dalam mendorong peningkatan kepemilikan rekening secara cepat dan meningkatkan inklusi keuangan. Salah satu contoh awal yaitu dengan menggunakan pembayaran gaji (upah) secara non tunai (transfer rekening), maka dapat memberikan stimulus peningkatan inklusi keuangan Negara. Secara global, bila pemerintah melakukan pembayaran dan transfer upah melalui rekening (bukan tunai), hal itu dapat meningkatkan jumlah pemilik rekening hingga 160 juta. (world bank, 2010)

Purba (2016) menyimpulkan indeks inklusi keuangan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah masuk rendah, hasil uji kausalitas indeks inklusi keuangan terhadap indeks gini menunjukkan adanya hubungan satu arah antara indeks gini ke indeks inklusi keuangan. Sedangkan kausalitas indeks inklusi keuangan dengan tingkat kemiskinan tidak memiliki hubungan kausalitas. Nasution, dkk (2013) melakukan penelitian terkait Keuangan Inklusi di Sumatera Utara dengan hasil bahwa Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 2010-2013 pemakai produk dan layanan perbankan masih rendah walaupun terjadi peningkatan Pendapatan (PDRB ADHK). Dalam kurun waktu pengamatan, jumlah penduduk di Sumatera Utara mengalami peningkatan, namun terjadi penurunan angkatan kerja. Artinya peningkatan pendapatan tidak sejalan dengan jumlah angkatan kerja. Jika dilihat dari unsur pendukung keuangan inklusi, Nasution dkk menggunakan factor jumlah kantor cabang tahun 2011 ke 2012, hasilnya terjadi penambahan jumlah kantor cabang yang cukup tinggi, namun pengguna produk dan layanan perbankan masih rendah. Sehingga Nasution, dkk menyimpulkan penetrasi keuangan di Sumatera Utara belum merata.

Bank Indonesia mendefinisikan Financial Technology (Fintech) *“as a phenomenon of fusion between technology and financial features that transform business models and a weak barrier to entry which lead to raises unregulated players to run the service as well as regulated financial financial institution”*.

Menurut definisi di atas kehadiran fintech sebenarnya memberi pengaruh positif bagi perekonomian secara makro. Fintech bisa menjangkau masyarakat hingga ke pelosok yang belum terjangkau oleh perbankan. Sedangkan perbankan sendiri tidak dapat menjangkau fintech karena terbentur regulasi. Ini memncerminkan masih terbukanya peluang pasar untuk perkembangan fintech bagi pengusaha-pengusaha non perbankan. Sri Mulyani dalam pidatonya di ICE BSD, menilai perusahaan financial technology dapat memberikan kemudahan akses keuangan bagi semua lapisan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka kemiskinan. Financial technology dapat menjadi saingan perbankan tradisional namun dapat juga mendukung perbankan ke arah perbankan modern. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh perbankan yang telah ada dapat dijangkau berkat penerapan financial technology. Penerapan SNKI yang diresmikan oleh pemerintah salah satunya untuk menekan tingkat kemiskinan. Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makanan. Kemiskinan juga dapat digambarkan dengan adanya keterbatasan akses individu/suatu golongan pada kekuasaan, akses ekonomi dan sumber daya alam, pendidikan, kesehatan, keamanan dan kesempatan pengembangan potensi diri. Keterbatasan akses ini kadang menjadi turun temurun yang dapat menyebabkan kemiskinan berkelanjutan.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah menyusun program implementasi strategi nasional keuangan inklusif dalam 6 pilar

SNKI yaitu Edukasi Keuangan, Fasilitas Keuangan Publik, Pemetaan Informasi Keuangan, Kebijakan (Peraturan) yang Mendukung, Fasilitas Intermediasi & Saluran Distribusi, Perlindungan Konsumen. Melalui 6 pilar SNKI diharapkan program pengentasan kemiskinan dapat terlaksana. Namun penerapan inklusi keuangan seharusnya didukung dengan sosial inklusi dan ekonomi inklusi (Syaifullah dalam Susilo, 2016). Salah satunya dukungan perbankan dalam pengembangan dunia usaha khususnya UMKM melalui KUR. Namun tidak semua bank tertarik menyalurkan KUR ke UMKM. Sehingga peran Bank Syariah pada penyaluran pembiayaan ke UMKM merupakan wujud dukungan perbankan untuk pengembangan usaha yang dapat mensukseskan program pengentasan kemiskinan. (Susilo, 2016). Moody's Analytics,(2016). Ada korelasi positif antara peningkatan penggunaan kartu elektronik dan pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pembayaran secara elektronik membuat ekonomi lebih efisien. Peningkatan penggunaan kartu elektronik mengurangi biaya transaksi dan juga meningkatkan aliran barang dan jasa. Pembayaran secara elektronik juga memajukan inklusi keuangan bagi masyarakat yang rentan terhadap akses perbankan yang formal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang telah ditentukan penulis untuk memproyeksikan kemungkinan peluang pengembangan Financial Technology jika dilihat dari Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan kemiskinan. Penelitian dilakukan di Sumatera Utara dengan menggunakan data sekunder terkait variabel yang diteliti.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan di Sumatera Utara

Indeks literasi keuangan nasional tahun 2016 menurut survei OJK sebesar 29.66 % mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 sebesar 21.84 %. Secara sektoral perbankan yang tertinggi sebesar 28.94% dan terendah pasar modal sebesar 4.40%. Masyarakat Indonesia hanya 36.02% yang memiliki kemampuan menghitung bunga, angsuran, hasil investasi, biaya penggunaan produk, denda dan inflasi. Untuk Sumatera Utara sendiri Indeks Literasi Keuangan di tahun 2016 sebesar 32.36% lebih tinggi daripada nasional.

Survei OJK tahun 2016 menunjukkan Indeks Inklusi Keuangan sebesar 67.82% mengalami peningkatan dimana ditahun 2013 sebesar 59.74%. Indeks Inklusi Keuangan untuk provinsi Sumatera Utara sebesar 75.27% lebih tinggi daripada nasional. Sektor BPJS kesehatan tertinggi sebesar 63.83% dan yang terendah adalah pasar modal 1.25%. Ini menunjukkan Sumatera Utara secara keseluruhan memiliki tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan yang lebih baik daripada provinsi yang lain. Pemahaman dan praktek keuangan telah berjalan baik dan masih bisa ditingkatkan lagi.

1. Digital Technologies, Financial Technology sebagai Pendorong Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

Menurut *McKinsey Global Institute* pada tahun 2014 hampir 80% orang dewasa di negara berkembang mempunyai *handphone* tetapi hanya 55% dari itu yang memiliki rekening tabungan. Ditargetkan di tahun 2020 pengguna *handphone* di negara berkembang menjadi 90%. *Fintech* sendiri memiliki manfaat diantaranya adalah masyarakat akan lebih paham terkait produk keuangan. Masyarakat dapat memilih produk keuangan sesuai dengan kebutuhan, masyarakat memiliki alternatif pilihan investasi dan *fintech* dapat membantu pengelolaan keuangan. Adapun tujuan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pemerintah adalah agar 75 % penduduk Indonesia memiliki akses terhadap produk keuangan ditahun 2019, dengan *fintech* tujuan tersebut bisa terjadi.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik. Hal ini bertujuan untuk menerapkan Sistem Penerimaan Negara Secara elektronik dan memanfaatkan teknologi informasi. Elektronifikasi transaksi merupakan suatu upaya mengubah transaksi masyarakat yang semula dilakukan secara manual menjadi elektronik, dari metode pembayaran secara tunai menjadi non tunai, dengan perilaku transaksi keuangan yang sebelumnya bersikat eksklusif menjadi inklusif. Tujuan dilakukannya elektronifikasi yaitu membuka akses masyarakat sampai ke daerah terpencil agar terhubung dengan layanan keuangan dan/atau lembaga keuangan. Lebih lanjut, elektronikasi juga menjadi salah satu cara mempercepat perluasan akses keuangan (*financial inclusion*), membuka kesempatan bagi masyarakat *unbanked* untuk mulai mengenali perbankan secara formal.

Implementasi program elektronifikasi di Sumatera Utara mendapat respon yang cukup baik. Pencanaan *roadmap* elektronifikasi pada Agustus 2014 diikuti dengan berbagai program di level daerah. Sumatera Utara, mengawali program elektronifikasi dengan penerapan pembayaran gaji pegawai negeri secara non tunai melalui Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di lingkungan Pemerintah Daerah. Hingga Oktober 2016, program elektronifikasi telah berhasil diimplementasikan di 134 instansi dari 217 instansi (62%) dengan jumlah pegawai yang beralih ke instrumen non tunai sebanyak 11.600 orang dari 20.700 orang pegawai (56%). Program elektronifikasi juga telah dilaksanakan pada sector swasta, tidak saja mencakup pembayaran gaji karyawan namun juga terkait aktivitas utama perusahaan lainnya. Capaian tersebut tentu menjadi sinyal positif dalam menciptakan efisiensi perekonomian di masyarakat. Untuk meningkatkan implementasi program di tingkat Provinsi maupun Kota Medan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh *McKinsey Global Institute* (September, 2016) pemerintah di negara berkembang akan berhemat sedikitnya \$ 110 Milyar per tahun jika merubah pembayaran secara digital serta dapat mengurangi kebocoran anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian *Moody's* terhadap 70 negara pada tahun 2011-2015 membuktikan bahwa penggunaan kartu elektronik dapat meningkatkan minat belanja konsumen dan memberikan prospek terjadinya siklus positif (*virtuous cycle*) terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Secara spesifik, ditemukan bahwa setiap peningkatan transaksi non tunai sebesar 10% akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,5%. Bila sektor swasta dan pemerintah membayar gaji secara digital (bukan tunai), mereka dapat berperan penting dalam mendorong peningkatan kepemilikan rekening secara cepat dan meningkatkan inklusi keuangan. Secara global, bila pemerintah melakukan pembayaran dan transfer upah melalui rekening (bukan

tunai), hal itu dapat meningkatkan jumlah pemilik rekening hingga 160 juta. (*world bank*, 2010)

Kondisi literasi keuangan Sumatera Utara menunjukkan peningkatan. Tercermin dari jumlah pemegang uang elektronik (*e-money*) dan instrumen non tunai lainnya di Sumatera Utara yang terus meningkat. Jumlah pemegang uang elektronik (*U-Nik*) pada periode laporan tercatat di Februari 2017 meningkat 2,2% (qtq) menjadi 35.400 dari sebelumnya 34.400 (KEKR Sumatera Utara, Feb 2017)

Untuk meningkatkan jangkauan dan memperluas penyediaan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia di April 2014. Dalam aturan tersebut, dimungkinkan bank dan Lembaga Selain Bank (LSB) penerbit uang elektronik bekerjasama dengan pihak ketiga atau agen yang bertindak atas nama bank untuk melayani kebutuhan masyarakat Indonesia di berbagai daerah akan layanan sistem pembayaran dan keuangan formal. Layanan dimaksud dikenal dengan nama Layanan Keuangan Digital (LKD). Sumatera Utara untuk *transfer person to account (P2A)* menjadi transaksi terbesar agen LKD.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia yang disampaikan perbankan di Kota Medan, jumlah agen LKD yang dilaporkan bulan Mei 2017 sebanyak 7.841 LKD. Sementara itu pemegang *e-money* di Sumatera Utara per Mei 2017 sebanyak 35.019. Perluasan akses keuangan melalui agen LKD menunjukkan peningkatan, namun agen terkonsentrasi di pusat kota. Hingga Desember 2016, jumlah agen LKD di Sumatera Utara tercatat terus meningkat, sebanyak 6.921 agen atau tumbuh 12,2% (qtq). Namun secara spasial, diketahui jumlah agen masih terkonsentrasi di Kota Medan, sebanyak 1.670 orang. Sementara daerah yang berada jauh dari ibukota, seperti Padang Lawas Utara justru hanya memiliki 1 orang agen.

Berdasarkan nominalnya, jenis transaksi yang paling banyak dilakukan pada triwulan IV 2016 di Sumatera Utara adalah *transfer person to account* dengan nominal mencapai Rp315,4 juta diikuti dengan fasilitas *top up* Rp 207 juta dan tarik tunai Rp 125 juta dengan kecenderungan meningkat. Transaksi *transfer person to account* paling banyak di Kabupaten Karo. Adanya transaksi yang dilakukan di daerah kabupaten menunjukkan tingkat inklusi keuangan yang semakin baik, dan bukti adanya respon masyarakat terhadap *fintech* untuk memanfaatkan fasilitas perbankan berbasis teknologi.

2. *Financial Technology* dapat Mengurangi Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan data *Global Findex* 2014, sekitar 69,3% penduduk dewasa di Indonesia terlayani jasa simpanan dan memiliki tabungan dalam berbagai bentuk, tetapi hanya 26,6% yang memiliki rekening tabungan pada lembaga keuangan formal. Sisanya memiliki tabungan dalam skema informal seperti tabungan dalam kelompok menabung atau dititipkan kepada orang lain diluar keluarga.

Berdasarkan data dari BI Sumatera Utara pada Triwulan IV 2016 deposito mendominasi Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 44,4%, diikuti oleh tabungan dan giro masing-masing sebesar 39,7% dan 15,9% . Komposisi DPK di Sumatera Utara relatif tidak berubah selama kurun waktu enam tahun terakhir. Pada triwulan IV 2016, DPK perbankan di Sumatera Utara sebagian besar berasal dari Kota Medan dengan proporsi 73%, Kabupaten Asahan dengan proporsi 5% dan Kota Pematangsiantar sebesar 4,9% .

Sementara itu, apabila dilihat dari jumlah rekening nasabah, proporsi terbesar adalah Medan dengan proporsi 44,7%, Kota Pematangsiantar dengan proporsi 7,8% dan Kabupaten Labuhan Batu dengan proporsi 5%. Selanjutnya apabila dilihat dari pertumbuhan DPK dan rekening dana, maka pertumbuhan DPK terbesar terdapat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan pertumbuhan 117% (yoy) pada triwulan IV-2016. Sementara pertumbuhan jumlah rekening dana terbesar pada triwulan IV 2016 adalah Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 46,5% (yoy). Perbankan masih di dominasi di daerah ibukota provinsi. Kondisi ini mencerminkan masih belum meratanya peran perbankan untuk memajukan perekonomian Sumatera Utara sampai ke pelosok daerah yang disebabkan oleh belum meratanya akses terhadap perbankan terkait keterbatasan jaringan perbankan.

Tabel 1.
Komposisi Konsumsi, Cicilan Pinjaman dan Tabungan Berdasarkan Pendapatan per Bulan

Klasifikasi Pendapatan	Tw I 2017			Tw II 2017		
	Konsumsi	Pinjaman	Tabungan	Konsumsi	Pinjaman	Tabungan
> Rp 1 juta <= Rp 2 juta	71,4	9,6	19	68,0	13,6	18,4
>Rp2 juta <= Rp 3 juta	69,1	13,3	17,5	65,4	14,5	20,1
>Rp 3 juta <= Rp 4 juta	64,3	15,2	20,5	65,3	10,8	23,9
>Rp 4 juta <= Rp 5 juta	60,5	15,7	23,9	61,7	14,8	23,5
> Rp 5 juta <= Rp 6 juta	53,4	20,1	26,6	54,4	12,8	32,8
> Rp 6 juta <= Rp 7 juta	48,9	13,9	37,3	51,1	17,8	31,2
> Rp 7 juta <= Rp 8 Juta	40,9	9,2	49,9	48,9	16,7	34,4
> Rp 8 Juta	49,1	17	33,9	42,5	18,6	38,9

Sumber: Bank Indonesia, Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumut, 2017

Data di atas menunjukkan kemampuan masyarakat Sumatera Utara menabung sudah cukup baik sudah diatas 15% dari pendapatan yang diperoleh, dengan peningkatan literasi keuangan potensi menabung masyarakat Sumatera Utara dapat ditingkatkan. Ada asumsi selama ini masyarakat yang berpenghasilan > 8 juta hanya mengetahui deposito sebagai pilihan investasi, dengan literasi keuangan yang baik serta didukung dengan *fintech* masyarakat lebih memahami pasar saham dan menjadikannya alternatif pilihan investasi selain deposito. *Fintech* menghadirkan edukasi investasi saham dan saham yang komprehensif secara gratis. Calon investor bisa mempelajari dahulu sebelum mengambil keputusan. *Fintech* menawarkan pembukaan rekening dan pembelian reksadana dan saham secara online. Tidak perlu lagi datang ke kantor cabang. Cukup transaksi via komputer dan aplikasi *mobile*.

Pada tahun 2014 penduduk Sumatera Utara yang tinggal di pedesaan adalah 6,98 juta jiwa (50%) dan yang tinggal diperkotaan sebesar 6,78 juta jiwa (49,26%). Untuk kemiskinan dibandingkan provinsi lainnya di Sumatera, persentase angka kemiskinan Sumatera Utara (9,5%) berada diposisi kelima setelah Bengkulu (17,32), Aceh (16,73), Lampung (14,29), dan Sumatera Selatan (13,54). (sumber BPS Sumut, 2014).

Berdasarkan data dari Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara, Angka Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada Triwulan I 2017 membaik bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tingkat kemiskinan di wilayah Sumatera Utara per triwulan I 2017 tercatat sebanyak 1.453,9 ribu jiwa atau

10,22% dari jumlah penduduk. Angka ini menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar 1.455,9 ribu jiwa atau 10,53% dari jumlah penduduk. Angka kemiskinan di Sumatera Utara jauh di bawah angka kemiskinan nasional yang tercatat sebesar 10,64% pada Triwulan I 2017.

Penurunan persentase jumlah penduduk miskin tersebut didorong oleh penurunan jumlah penduduk miskin yang ada di kawasan pedesaan. Jumlah penduduk miskin di desa menurun dari 765,1 ribu jiwa pada Juni 2016 atau 10,97% menjadi 743,2 ribu jiwa pada Triwulan I 2017 atau 10,66% dari jumlah penduduk. Sementara jumlah penduduk miskin di kota cenderung meningkat yaitu dari 690,8 ribu jiwa atau 9,7% dari jumlah penduduk pada Triwulan I 2016 menjadi 710,7 ribu jiwa atau 9,8% dari jumlah penduduk pada Triwulan I 2017. Keadaan ini bisa saja mengindikasikan adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota yang menyebabkan terjadinya peralihan tingkat kemiskinan tersebut. Hal ini juga bisa mengindikasikan beberapa pelaksanaan penunjang pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan berjalan baik, sehingga tingkat kemiskinan di daerah pedesaan menurun.

Program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk meredam kemiskinan pada dasarnya bersinergi dengan program yang mendukung peningkatan literasi keuangan maupun inklusi keuangan. Fintech sebagaimana telah dipaparkan di atas masih terbuka peluang untuk dikembangkan, sehingga dapat mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Dan pada akhirnya dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan *digital technologies* di Sumatera Utara cukup baik, dilihat dari penggunaan *instrument non* tunai pada proses pembayaran gaji karyawan negeri maupun swasta, penggunaan kartu elektronik untuk transaksi ekonomi, dan penggunaan uang elektronik (*e-money*, *U-Nik*), yang mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Sehingga sangat dimungkinkan tumbuhnya *fintech* di Sumatera Utara.
2. Indeks literasi keuangan Sumatera Utara berada pada posisi baik bahkan jika dibandingkan indeks literasi keuangan secara nasional. Hal ini tentunya akan mendukung potensi pengembangan *fintech* di Sumatera Utara.
3. Indeks inklusi keuangan Sumatera Utara menunjukkan sangat baik, bahkan jika dibandingkan indeks inklusi keuangan nasional pada tahun 2016. Terutama dilihat dari literasi keuangan pada sector BPJS. Artinya pemahaman dan praktek keuangan masyarakat Sumatera Utara secara garis besar telah baik dan dapat menjadi pendorong penerapan *fintech* di Sumatera Utara.
4. Untuk faktor kemiskinan, Sumatera Utara juga cukup baik. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan, walaupun terjadi peningkatan di daerah perkotaan. Namun peningkatan ini tidak signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan belum menjadi penghambat penerapan *fintech* di Sumatera Utara baik di daerah pedesaan maupun perkotaan.

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia, (2017). Mengoptimalkan Potensi Perekonomian Domestik Sumatera Utara, Kajian Ekonomi Dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Februari 2017.
- Bansal, Shashank, (2014). Perspective of Technology in Achieving Financial Inclusion Rural India. *Procedia Economics and Finance*. Volume 11, 2014 Page 472-480. <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567114002135>
- BI, (2017). Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Kuat, Inklusif dan Berkelanjutan. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017.
- Badan Pusat Statistik, (2015). Sumatera Utara Dalam Angka. Dilihat pada 20 Agustus, 2017. http://sumut.bps.go.id/backend/pdf_publicasi/Sumatera-Utara-Dalam-Angka-2015.pdf.
- Indonesia Fintech Report, (2016). Dilihat 18 Agustus, 2017. <https://dailysocial.id/report/post/indonesias-fintech-report-2016>.
- Jumlah Penduduk Tanpa Rekening Bank Menurun : Laporan Terbaru Bank Dunia. Dilihat 18 Agustus 2017. <http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2015/04/15/massive-drop-in-number-of-unbanked-says-new-report>.
- Malik, Zaini Abdul, N. Eva Fauziah dkk, (2015), Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Melalui Literasi Tata Cara Pembentukan Koperasi Syariah Di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka, Prosiding SnaPP, Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Vol 5, No 1. <http://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/view/127>
- Mckinsey Global Institute, (2016). Digital Finance For All: Powering inclusive Growth In Emerging Economies September 2016. Dilihat 25 Agustus 2017. <http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/how-digital-finance-could-boost-growth-in-emerging-economies>
- Moody's Analytics, (2016). The Impact of Electronic Payments on Economic Growth, <https://usa.visa.com/dam/VCOM/download/visa-everywhere/global-impact/impact-of-electronic-payments-on-economic-growth.pdf>.
- Otoritas Jasa Keuangan, (2017). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016. Dilihat 20 Agustus 2017. Badan Pusat Statistik, (2015). Sumatera Utara Dalam Angka. Dilihat pada 20 Agustus, 2017. http://sumut.bps.go.id/backend/pdf_publicasi/Sumatera-Utara-Dalam-Angka-2015.pdf.